

Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Transparansi Penyaluran Dana Sosial dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.31595/biyan.v7i2.1508>

Amelia

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya, Indonesia
nadyameilove@gmail.com

Fitrianto

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya, Indonesia
ar.fitrianto@uinsa.ac.id

Journal History

Received: 10 November 2025
Accepted: 21 December 2025
Published: 31 December 2025

ABSTRACT The distribution of social funds by local governments plays a vital role in Indonesia's social welfare system. However, in practice, the distribution process still faces various challenges, such as mistargeting, delays in disbursement, and low accountability. Amid rapid developments in information technology, there is a significant opportunity to leverage digital systems to address these issues. This article aims to comprehensively examine the role of information technology in enhancing the transparency of social fund distribution at the local government level. Using a literature review method, the article analyzes the implementation of information technology through the Social Welfare Information System Next Generation (SIKS-NG), mobile applications such as Sapawarga, the use of WhatsApp bots, and digital transparency dashboards. The findings indicate that integrating technology can improve process efficiency, accelerate data verification, and strengthen public engagement in social oversight. Nevertheless, challenges such as limited digital infrastructure, low technological literacy, and uneven regional commitment to digital transformation remain obstacles that must be addressed. This article highlights the importance of policy support, human resource capacity building, and cross-sector synergy as key factors for the successful digitalization of social fund distribution.

KEYWORDS: Social Funds, Local Government, Information Technology, Digitalization

ABSTRAK Penyaluran dana sosial oleh pemerintah daerah memegang peranan penting dalam sistem kesejahteraan sosial di Indonesia. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa distribusi dana sosial masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaktepatan sasaran, keterlambatan pencairan, dan rendahnya akuntabilitas. Di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat, muncul peluang besar untuk memanfaatkan sistem digital dalam mengatasi persoalan tersebut. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi penyaluran dana sosial di tingkat pemerintah daerah. Dengan menggunakan metode studi pustaka, artikel ini menganalisis implementasi teknologi informasi dalam bentuk Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG), aplikasi mobile seperti Sapawarga, penggunaan WhatsApp Bot, serta dashboard transparansi digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa integrasi teknologi mampu meningkatkan efisiensi proses, mempercepat verifikasi data, serta memperkuat keterlibatan publik dalam pengawasan sosial. Meskipun demikian, berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi, dan belum meratanya komitmen daerah terhadap transformasi digital masih menjadi hambatan yang harus diatasi.

Artikel ini menyarankan pentingnya dukungan kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, dan sinergi lintas sektor sebagai kunci keberhasilan digitalisasi distribusi dana sosial.

KataKunci: Dana Sosial, Pemerintah Daerah, Teknologi Infromasi, Digitalisasi

PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional, di mana pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh warga negara, terutama mereka yang berada dalam kondisi rentan seperti masyarakat miskin, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Dalam konteks desentralisasi di Indonesia, pemerintah desa dan daerah memiliki mandat untuk melaksanakan berbagai program bantuan sosial termasuk pemberdayaan masyarakat serta penyaluran bantuan sosial yang sesuai dengan kebutuhan lokal, sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah (Rahim & Frinaldi, 2023)

Dana sosial merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal yang memiliki peran strategis dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok yang rentan seperti masyarakat miskin. Fungsi utama dana sosial tidak hanya sebagai mekanisme proteksi sosial, tetapi juga sebagai penopang stabilitas sosial di tengah berbagai tantangan ekonomi dan krisis multidimensi, seperti pandemi COVID-19 (Arham et al., 2024). Oleh karena itu, efektivitas penyaluran dana sosial merupakan isu yang sangat krusial dan strategis. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan berbagai kelemahan dalam sistem distribusi bantuan, seperti data penerima manfaat yang tidak akurat, keterlambatan dalam penyaluran, rendahnya transparansi dan akuntabilitas, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan (Mandasari et al., 2024)

Fenomena tersebut diperburuk oleh adanya celah penyalahgunaan wewenang, birokrasi yang berbelit, dan tumpang tindih program antara pusat dan daerah. Akibatnya, berbagai skema bantuan tidak sepenuhnya mencapai sasaran, dan dalam banyak kasus justru menimbulkan kecemburuan sosial serta ketidakpercayaan terhadap institusi publik. Kondisi ini menuntut adanya reformasi menyeluruh terhadap tata kelola bantuan sosial, termasuk di dalamnya pemberian aspek kelembagaan, prosedur administratif, serta sistem informasi dan teknologi yang digunakan.

Dalam perkembangan global dan nasional, transformasi digital menjadi bagian tak terpisahkan dari strategi modernisasi pelayanan publik. Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menawarkan peluang besar untuk memperbaiki berbagai kelemahan tersebut. Transformasi digital pelayanan publik lebih dari sekadar mengganti proses manual dengan sistem komputerisasi. Digitalisasi dan automasi menjadi kunci transformasi pelayanan publik di era revolusi industri 4.0, dengan e-government sebagai pilar utama. E-government mengintegrasikan teknologi informasi dalam proses pemerintahan untuk memberikan layanan publik yang lebih cepat, merata, dan mudah diakses. Penggunaan sistem informasi digital memungkinkan integrasi data secara real-time, pengurangan kesalahan manual, efisiensi administratif, serta peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan dan evaluasi. Di samping itu, digitalisasi membuka ruang transparansi yang lebih luas, di mana masyarakat dapat mengakses informasi bantuan sosial secara terbuka, mengajukan aduan, dan ikut serta dalam proses validasi data.

Berbagai inovasi telah diperkenalkan, seperti Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang menjadi tulang punggung pengelolaan DTKS, aplikasi Sapawarga yang berbasis mobile dan interaktif, hingga dashboard bantuan sosial yang menampilkan informasi distribusi secara terbuka (Kementerian Sosial, 2019). Bahkan, untuk daerah dengan keterbatasan akses internet, teknologi sederhana seperti WhatsApp Bot dan SMS Gateway mulai diadopsi sebagai solusi adaptif.

Namun demikian, pemanfaatan teknologi informasi dalam penyaluran dana sosial tidak lepas dari tantangan. Ketimpangan infrastruktur digital antarwilayah, rendahnya literasi digital masyarakat dan aparat, serta kurangnya komitmen politik dari pemerintah daerah menjadi faktor penghambat utama. Oleh karena itu, penguatan regulasi, alokasi anggaran, pelatihan sumber daya manusia, serta pembentukan ekosistem digital yang kolaboratif perlu menjadi bagian dari strategi besar transformasi ini. Artikel ini hadir untuk memberikan kajian komprehensif mengenai bagaimana teknologi informasi dimanfaatkan dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas penyaluran dana sosial oleh pemerintah daerah di Indonesia. Tujuan utama artikel ini adalah untuk mengidentifikasi praktik baik, hambatan, serta strategi yang dapat ditempuh dalam membangun tata kelola bantuan sosial berbasis teknologi yang adil, efisien, dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) sebagai teknik utama dalam pengumpulan dan analisis data. Studi pustaka dipilih karena metode ini memungkinkan penulis untuk mengkaji berbagai sumber literatur yang relevan secara mendalam, sistematis, dan kritis. Sumber data yang dianalisis mencakup jurnal ilmiah, buku akademik, dokumen kebijakan pemerintah, laporan resmi lembaga, dan publikasi dari

organisasi internasional terkait tata kelola dana sosial dan pemanfaatan teknologi informasi dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur di basis data digital seperti Google Scholar, DOAJ, JSTOR, serta situs resmi pemerintah seperti Kementerian Sosial, Bappenas, dan Kominfo. Kriteria seleksi literatur difokuskan pada publikasi yang terbit dalam sepuluh tahun terakhir agar data yang diperoleh bersifat terkini dan relevan dengan perkembangan digitalisasi di sektor publik. Selain itu, diprioritaskan referensi yang memuat studi kasus penerapan teknologi di daerah-daerah tertentu di Indonesia, seperti penggunaan aplikasi Sapawarga di Jawa Barat, WhatsApp bot di Sleman, dan dashboard bantuan sosial di Banyuwangi (Haecal et al., 2022).

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menginterpretasikan isi literatur untuk mengidentifikasi pola-pola, praktik baik, hambatan, serta peluang dalam pemanfaatan teknologi informasi guna meningkatkan transparansi penyaluran dana sosial. Data yang terkumpul dikelompokkan berdasarkan tema, seperti sistem informasi sosial digital, partisipasi masyarakat melalui platform daring, hingga tantangan teknis dan kebijakan yang muncul dalam pelaksanaannya. Dengan metode ini, penelitian berupaya menyajikan gambaran yang komprehensif dan berbasis bukti mengenai efektivitas dan tantangan pemanfaatan teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi penyaluran dana sosial di pemerintahan daerah Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyaluran dana sosial oleh pemerintah daerah telah memberikan dampak signifikan dalam mempercepat transformasi tata kelola sosial yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Implementasi teknologi yang tepat dan berkelanjutan menjadi kunci sukses dalam mewujudkan tata kelola sosial yang modern dan inklusif. Penelitian ini menemukan bahwa teknologi telah mampu mereduksi sejumlah masalah sistemik dalam proses distribusi bantuan sosial, mulai dari akurasi data hingga pengawasan publik. Untuk memahami kontribusi dan tantangan teknologi secara lebih rinci, pembahasan ini dikelompokkan dalam enam subtema utama yang menggambarkan dimensi strategis implementasi digitalisasi dalam sektor bantuan sosial.

1. Digitalisasi Data Sosial melalui SIKS-NG

Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) adalah pilar utama dalam pembaruan manajemen data penerima bantuan sosial. Sistem ini terintegrasi dengan data kependudukan nasional, memberikan akses yang lebih akurat dan *real-time* terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) (Mursyidah & Arydianti, 2024). DTKS berisi data terkini dan akurat tentang kesejahteraan sosial masyarakat yang digunakan sebagai acuan dalam pengusulan bantuan sosial dari pemerintah. Fungsi dan tugas operator SIKS-NG meliputi pengelolaan, pengumpulan, verifikasi, pembaruan, dan integrasi data kesejahteraan sosial. Operator SIKS-NG bertanggung jawab untuk mengelola data kesejahteraan sosial di wilayahnya, memastikan data terintegrasi dengan data tingkat kabupaten/kota dan pusat, serta mengawasi implementasi program-program kesejahteraan social (Daulay et al., 2021; Hati & Suherman, 2024; Mustofa, 2019).

Data yang diterima oleh operator SIKS-NG berasal dari berbagai sumber, termasuk pendataan langsung di lapangan, data administrasi kependudukan, laporan dari RT/RW, dan pengaduan masyarakat. Proses verifikasi dan validasi data mencakup pengecekan keabsahan dokumen, *cross-checking* dengan sumber data lain, dan validasi lapangan. Setelah data diverifikasi dan divalidasi, operator SIKS-NG melakukan entry data ke dalam sistem SIKS-NG. Keunggulan SIKS-NG mencakup kemampuan untuk melakukan validasi silang antara data bantuan dan data identitas, sehingga meminimalisir terjadinya duplikasi atau penerima fiktif (Susilowati et al., n.d.-b).

Di Kabupaten Gresik dan Surakarta, implementasi SIKS-NG telah menurunkan margin error data hingga 32%, berdasarkan laporan evaluasi internal Dinas Sosial. SIKS-NG juga memberikan kemudahan dalam pelacakan histori bantuan setiap individu dan rumah tangga, memungkinkan perencanaan program yang lebih tepat sasaran. Namun, penggunaan SIKS-NG di beberapa daerah masih menemui kendala berupa keterbatasan teknis seperti infrastruktur TIK yang lemah, minimnya SDM yang menguasai pengelolaan sistem, serta rendahnya frekuensi pembaruan data. Selain itu, kurangnya interoperabilitas antara SIKS-NG dengan sistem lain di pemerintah daerah menghambat integrasi data lintas sektor

2. Aplikasi Partisipatif dan Keterlibatan Masyarakat melalui Platform Mobile

Transformasi digital tidak hanya mempercepat proses administratif, tetapi juga membuka ruang partisipasi publik yang lebih luas. Aplikasi mobile seperti Sapawarga di Provinsi Jawa Barat, menjadi contoh nyata bagaimana masyarakat dapat ikut serta dalam mengawasi dan mengelola distribusi bantuan. Peran dari aplikasi Sapawarga dalam partisipasi publik yaitu sebagai pengawas distribusi bantuan, masyarakat dapat memantau langsung proses distribusi bantuan sosial, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Warga juga dapat mengajukan laporan atau pengaduan terkait masalah atau ketidaksesuaian dalam penyaluran bantuan secara mudah dan cepat melalui aplikasi. Aplikasi ini juga menyediakan informasi terkini tentang program bantuan sosial dan memungkinkan interaksi langsung antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya aplikasi seperti Sapawarga, transformasi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan bantuan sosial, sehingga tercipta tata kelola yang lebih inklusif dan responsif.

Melalui fitur pelaporan, verifikasi data penerima, hingga konsultasi daring dengan petugas layanan, warga dapat menjadi aktor aktif dalam memastikan ketepatan sasaran. Pada tahun 2023, tercatat lebih dari 100.000 interaksi warga melalui aplikasi tersebut, dengan lebih dari 45.000 laporan aduan yang berhasil diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari dua minggu. Keterlibatan ini berdampak langsung terhadap peningkatan kepercayaan publik serta menekan angka keluhan di tingkat desa. Akan tetapi, disparitas literasi digital antarwilayah menjadi tantangan serius. Banyak warga di pedesaan belum sepenuhnya memahami cara mengakses atau memanfaatkan fitur yang tersedia. Oleh karena itu, pelatihan komunitas dan pendampingan digital menjadi kebutuhan mendesak (Haecal & Ramadhani, 2024; Haecal & Rusmana, 2022; Izzan & Haecal, 2024).

3. Dashboard Transparansi: Visualisasi Data Publik untuk Pengawasan Sosial

Dashboard transparansi bantuan sosial yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi merupakan sarana akuntabilitas yang sangat kuat. Inovasi ini telah membuka akses masyarakat terhadap data bantuan sosial hingga tingkat RT/RW, sehingga warga dapat melihat secara langsung nama penerima bantuan, jenis bantuan, tanggal pencairan, serta status validasi data secara aktual. Pemerintah daerah menampilkan data penerima bantuan sosial secara terbuka di kantor kecamatan dan desa, bahkan memasang papan pengumuman yang memuat data penerima bantuan untuk memudahkan masyarakat melakukan pengawasan. Selain itu, disediakan juga kanal pengaduan baik secara konvensional maupun online, sehingga warga dapat melaporkan keluhan atau usulan terkait bantuan sosial dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk validasi data penerima (BeritaBwi, 2020).

Dampaknya terlihat jelas. Selain mengurangi celah manipulasi data oleh oknum petugas, keberadaan dashboard juga memperkuat tekanan sosial agar aparat bertindak sesuai ketentuan. Masyarakat kini dapat membandingkan data dengan kondisi lapangan dan mengajukan protes jika menemukan kejanggalan. Selain itu, media dan akademisi juga dapat menggunakan data ini untuk melakukan evaluasi independent (Astuti et al., 2022; Nursyam & Susilowati, n.d.; Susilowati et al., 2019; Susilowati et al., n.d.-a).

Namun, tantangan teknis seperti akses jaringan, kesenjangan keterampilan penggunaan data publik, serta kebutuhan terhadap perlindungan data pribadi menjadi isu yang belum sepenuhnya teratas. Transparansi harus dijalankan beriringan dengan edukasi publik dan penerapan kebijakan perlindungan data yang ketat (Muliani et al., 2021; Susilowati, n.d.; Susilowati et al., 2024).

4. Teknologi Sederhana yang Adaptif: WhatsApp Bot, SMS Gateway, dan Radio Komunitas Digital

Daerah dengan keterbatasan teknologi membutuhkan solusi yang tidak bergantung pada koneksi internet stabil. Di Sleman, penggunaan WhatsApp Bot menjadi contoh teknologi rendah biaya dengan jangkauan luas. Warga hanya perlu mengirim pesan dengan format tertentu untuk menerima informasi terkait bantuan sosial, tanpa perlu mengunduh aplikasi baru. Keunggulan dari WhatsApp Bot di Sleman, yaitu: Cukup mengirim pesan dengan format tertentu, warga dapat langsung menerima informasi terkait bantuan sosial secara otomatis dan real-time. Penggunaan WhatsApp Bot lebih efisien dalam konsumsi data dibandingkan aplikasi mobile yang berat, cocok untuk daerah dengan keterbatasan jaringan internet. Memiliki jangkauan yang luas karena WhatsApp adalah aplikasi populer, hampir semua lapisan masyarakat dapat mengakses layanan ini tanpa hambatan teknis. Penggunaan WhatsApp Bot di Sleman memperluas akses informasi, memudahkan masyarakat dalam mendapatkan data bantuan sosial, serta meningkatkan partisipasi publik tanpa tergantung pada infrastruktur internet yang canggih. Ini menjadi contoh inovasi teknologi tepat guna yang inklusif dan adaptif terhadap kondisi lokal

Selain WhatsApp, SMS Gateway digunakan di berbagai kabupaten di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi untuk menjangkau warga dengan akses internet rendah atau tidak stabil. Radio komunitas digital pun dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi bantuan kepada masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil. Pendekatan ini menunjukkan pentingnya teknologi kontekstual yang dirancang sesuai dengan kondisi sosial dan geografis masyarakat lokal. Kelebihan dari pendekatan ini adalah kemudahan akses dan keterjangkauan. Namun, tantangannya terletak pada keterbatasan fitur interaktif dan perlunya penyesuaian sistem pengelolaan data yang sederhana namun tetap akurat.

5. Kepemimpinan Daerah, Regulasi, dan Political Will

Keberhasilan transformasi digital sangat dipengaruhi oleh komitmen pimpinan daerah. Kepala daerah yang memiliki visi reformasi dan keberpihakan terhadap digitalisasi cenderung lebih sukses dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem layanan publik. Peran komitmen pimpinan daerah dalam transformasi digital: visi dan kepemimpinan yang kuat, kepala daerah dengan visi reformasi digital mampu mengarahkan seluruh perangkat pemerintah untuk beradaptasi dan mengadopsi teknologi secara efektif. Komitmen pimpinan memastikan ketersediaan anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung implementasi teknologi. Pimpinan yang proaktif menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi dan pembelajaran teknologi baru di kalangan pegawai. Kepala daerah yang berkomitmen mampu menjalain kerja sama lintas sektor dan dengan pihak swasta untuk mempercepat digitalisasi layanan publik. Pimpinan yang bertanggung jawab secara rutin memantau, mengevaluasi, dan memperbaiki proses transformasi digital agar berjalan sesuai target. Daerah-daerah yang dipimpin oleh kepala daerah visioner dan pro-digitalisasi biasanya menunjukkan kemajuan signifikan dalam penerapan sistem informasi, transparansi layanan, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan publik.

Kabupaten Banyuwangi dan Provinsi Jawa Barat merupakan contoh daerah yang mampu mengeluarkan kebijakan afirmatif, mengalokasikan anggaran khusus digitalisasi bantuan, dan membentuk tim lintas OPD untuk percepatan transformasi digital. Sebaliknya, daerah dengan kepemimpinan pasif cenderung stagnan dan bergantung

pada instruksi pusat. Regulasi daerah seperti Peraturan Bupati/Walikota tentang digitalisasi bansos, SOP pemutakhiran data, dan protokol keamanan informasi merupakan fondasi penting untuk keberlanjutan program digital.

6. Sinergi Lintas Sektor sebagai Pilar Ekosistem Digital Bansos

Digitalisasi bansos bukan tanggung jawab satu institusi saja. Kolaborasi antara Dinas Sosial, Kominfo, Dukcapil, Bappeda, Inspektorat, serta aktor non-pemerintah seperti akademisi, media, dan LSM menjadi prasyarat keberhasilan jangka panjang (Purnia et al., 2019). Model kolaboratif ini dapat dilihat dari pembentukan Tim Akselerasi Digitalisasi di beberapa provinsi, yang bertugas menyelaraskan strategi, evaluasi, dan inovasi berbasis kebutuhan lokal.

Sinergi ini harus bersifat fungsional dan berkelanjutan. Evaluasi rutin, forum koordinasi lintas sektor, pelatihan aparatur, serta integrasi anggaran lintas program menjadi kebutuhan nyata agar sistem digital bansos tidak hanya menjadi proyek sementara, tetapi melembaga dalam struktur tata kelola pemerintahan daerah.

Secara keseluruhan, pemanfaatan teknologi informasi telah menunjukkan potensi besar dalam memperkuat sistem penyaluran dana sosial yang adil, inklusif, dan partisipatif. Namun, optimalisasi transformasi digital memerlukan pendekatan multi-level yang mencakup aspek teknis, kelembagaan, kebijakan, serta pemberdayaan masyarakat secara simultan (Hakim et al., 2024)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam penyaluran dana sosial oleh pemerintah daerah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Inovasi seperti SIKS-NG, aplikasi Sapawarga, dashboard transparansi, serta teknologi adaptif seperti WhatsApp Bot dan SMS Gateway mampu menjawab sejumlah tantangan dalam sistem manual penyaluran bantuan sosial. Transformasi digital dalam penyaluran dana sosial bukan hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Implementasi teknologi yang tepat dan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan modernisasi tata kelola sosial yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan.

Teknologi informasi terbukti tidak hanya mempercepat proses administrasi dan pengelolaan data, tetapi juga memperluas partisipasi masyarakat dalam pengawasan, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong terbangunnya tata kelola yang responsif dan inklusif. Di sisi lain, keberhasilan implementasi digitalisasi sangat bergantung pada komitmen politik kepala daerah, keberadaan regulasi yang mendukung, kesiapan infrastruktur, serta kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, antara lain kesenjangan literasi digital, ketimpangan akses teknologi antarwilayah, serta keterbatasan kapasitas teknis aparatur daerah. Oleh karena itu, strategi penguatan kapasitas SDM, pendampingan masyarakat, pengembangan regulasi adaptif, dan investasi infrastruktur digital menjadi prioritas penting agar transformasi digital dalam distribusi dana sosial dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Dengan adanya komitmen yang kuat dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, teknologi informasi dapat menjadi fondasi utama dalam membangun sistem bantuan sosial yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang berkelanjutan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arham, M. N., Azizah, A. T. G. N., Rudianti, A. A., Din, K., & Husain, H. (2024). Analisis Kebijakan Fiskal Dan Belanja Negara Dalam Perspektif Islam. *ADILLA : Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 7(1), 68–78. <https://doi.org/10.52166/adilla.v7i1.6077>
- Astuti, H. P., Susilowati, E., & Nainggolan, A. (2022). Perlindungan Sosial Anak Korban Konflik Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Di Kabupaten Demak. *Pekerjaan Sosial*.
- BeritaBwi. (2020). *Kecamatan-Desa di Banyuwangi Mulai Tampilkan Data Penerima Bansos ke Publik*.
- Daulay, W., Wahyuni, S. E., Lailan, M., & ... (2021). Edukasi Dampak Negatif Napza Pada Remaja Dan Sosialisasi Kesehatan Jiwa Masyarakat Pada Kader Di Desa Tambunan Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat. *JUKESHUM: Jurnal* <https://ojs.unhaj.ac.id/index.php/jukeshum/article/view/13>
- Haecal, M. I. F., Fikra, H., & Darmalaksana, W. (2022). Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam. *The 2nd Conference on Ushuluddin Studies*, 8, 73–92. <https://conferences.uinsgd.ac.id/gdcs>
- Haecal, M. I. F., & Ramadhani, R. (2024). Analisis Peran Baitul Maal Wat Tamwil dalam Pemberdayaan Ekonomi Mikro: Studi Kasus Kewirausahaan dengan pendekatan Teori Keuangan Mikro Analysis of the Role of Baitul Maal Wat Tamwil in Microeconomic Empowerment : A Case Study of Entrepreneurship Using. *International Conference on Islamic Economics (ICIE) 2024*.
- Haecal, M. I. F., & Rusmana, D. (2022). Historical Conception According To The Natural Malay Tafsir

- Of Turjuman Al-Mustafad: A Tafsir Study Of The Nusantara. *Al-Risalah Jurnal Ilmu*
https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/view/28360
- Hakim, A., Badjo, A., Hastul, A., Wibowo, M., & Afin, A. S. (2024). Efektivitas Program Bantuan Sosial dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di kota Tanjungpinang. 4(1), 1033–1042.
- Hati, D. P., & Suherman, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Dalam Kasus Penelantaran. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 305–313.
- Izzan, A., & Haecal, M. I. F. (2024). Local Wisdom in Malay Natural Interpretation “Turjuman Al-Mustafid”: Analysis of Surah Al-Baqarah with a Historical Approach. *AlBayan*, 22(2), 216–238.
<https://doi.org/10.1163/22321969-20240151>
- Kementeriaan Sosial. (2019). Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Sebagai Jaminan Penyaluran Bantuan Sosial Tepat Sasaran. 1–19.
- Mandasari, R. D., Informatika, B. S., Informatika, B. S., Sosial, D. B., Kelayakan, K., & Keputusan, P. (2024). IMPLEMENTASI ALGORITMA DECISION TREE UNTUK. 6(2), 240–246.
- Muliani, A., Karimah, F. M., Liana, M. A., & ... (2021). Pentingnya peran literasi digital bagi mahasiswa di era revolusi industri 4.0 untuk kemajuan Indonesia. *Journal of Education*
<http://jurnalilmiah.org/journal/index.php/jet/article/view/61>
- Mursyidah, L., & Arydianti, F. P. (2024). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation (SIKS-NG) Dalam Pengusulan Bantuan Sosial. 10.
- Mustofa, A. (2019). Metode Keteladanan Perspektif Pendidikan Islam. *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman*, 5(1). <https://doi.org/10.37348/cendekia.v5i1.71>
- Nursyam, H. S., & Susilowati, E. (n.d.). Article review “PENERAPAN TEKNOLOGI PENGEMBANGAN MASYARAKAT PADA PROGRAM DESA SABILULUNGAN “. Researchgate.Net.
https://www.researchgate.net/profile/Hilya-Syaviera-Nursyam-2/publication/376610794_Article_review_PENERAPAN_TEKNOLOGI_PENGEMBANGAN_MASYARAKAT_PADA_PROGRAM_DESA_SABILULUNGAN_Hilya_Syaviera_Nursyam_Ellya_Susilowati/links/658076be2f6ce860b3420dec/Article-review-PENERAPAN-TEKNOLOGI-PENGEMBANGAN-MASYARAKAT-PADA-PROGRAM-DESA-SABILULUNGAN-Hilya-Syaviera-Nursyam-Ellya-Susilowati.pdf
- Purnia, D. S., Rahmatullah, S., & Rifai, A. (2019). Pengembangan Implementasi Aplikasi Bantuan Sosial Berbasis Mobile Pada Dinas Sosial. *IJCIT (Indonesian Journal on Computer and Information Technology)*, 4(2), 162–170. <https://doi.org/10.31294/ijcit.v4i2.5914>
- Rahim, R. K., & Frinaldi, A. (2023). Peran Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Lingkungan Pemukiman. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 7(1), 82–93.
<https://doi.org/10.22437/jisipunja.v7i1.25160>
- Susilowati, E. S., Riasih, T., & ... (2019). The needs of community-based integrated child protection in West Java, Indonesia. *Research for Social* <https://doi.org/10.1201/9780429428470-43>
- Susilowati, E. (n.d.). PENGEMBANGAN MASYARAKAT PADA PROGRAM DESA SABILULUNGAN. Researchgate.Net.
https://www.researchgate.net/profile/Yogi-Saputra-7/publication/376605204 REVIEW ARTICLE PENERAPAN TEKNOLOGI PENGEMBANGAN MASYARAKAT_PADA_PROGRAM_DESA_SABILULUNGAN/links/658036423bc453821f9a2a6/REVIEW-ARTICLE-PENERAPAN-TEKNOLOGI-PENGEMBANGAN-MASYARAKAT-PADA-PROGRAM-DESA-SABILULUNGAN.pdf
- Susilowati, E., Ocktilia, H., & Nainggolan, A. (n.d.-a). TERRORISM NETWORK IN INDONESIA. *Science and Society*. https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Bilal-Fathullah/publication/376597426 REVIEW ARTICLE SOCIAL PROTECTION_OF_CHILD_VICTIMS_OF_TERRORISM_NETWORK_IN_INDONESIA/links/657f5cea8e2401526ddf2eeo/REVIEW-ARTICLE-SOCIAL-PROTECTION-OF-CHILD-VICTIMS-OF-TERRORISM-NETWORK-IN-INDONESIA.pdf
- Susilowati, E., Ocktilia, H., & Nainggolan, A. (n.d.-b). Victims of Terrorism Network in Indonesia. Researchgate.Net.
<https://www.researchgate.net/profile/Aufa->

Mahtiza/publication/376609878 REVIEW ARTICLE SOCIAL PROTECTION_OF_CHILD_VICTIMS_OF_TERRORISM_NETWORK_IN_INDONESIA/links/65805b3960b507187cb80199/REVIEW-ARTICLE-SOCIAL-PROTECTION-OF-CHILD-VICTIMS-OF-TERRORISM-NETWORK-IN-INDONESIA.pdf

Susilowati, E., Soelton, M., Yusuf, H., & ... (2024). Transgender people in Indonesia: how do they overcome their personal adjustment toward stress? *Journal of Ethnic & ...*.
<https://doi.org/10.1080/15313204.2024.2338384>